

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH

Marhendi<sup>1</sup>, John Kenedi<sup>2</sup>, Asnaini<sup>3</sup>

Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

marhendibima82@gmail.com<sup>1</sup>, johnkenedi297@yahoo.com<sup>2</sup>, asnaini@iainbengkulu.ac.id<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materilnya saja, akan tetapi dalam perkara ini hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah

## Abstract

This study raises the problem of why the judge rejected the case 85/Pdt.P/2017/PA.Bn concerning the marriage certificate and how the reason for determining the judge in case No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn concerning the marriage certificate and how the reasons for determining the judge in case No. 85/ Pdt.P/2017/ PA.Bn concerning marriage certificate in terms of Article 2 of Law No. 1 Year 1974 and KHI. To answer these problems, the legal research method used is normative juridical, with a legal approach, a case approach, and a conceptual approach, and a method for collecting legal materials for documentary studies and literature reviews after the data is obtained and an inventory of legal materials collected based on its relevance to the subject matter with this study then analyzed by descriptive normative. The results of the study indicate that: the reason for the Judge to reject the Petitioner's petition in the case 85/Pdt.P/2017/PA.Bn concerning the marriage certificate is because it contradicts Article 9 of Law No. 1 of 1974 and Article 40 letter a Compilation of Islamic Law, so that the marriage is considered invalid and the reason for the determination of the judge in the case 85 Pdt.P/2017/ PA.Bn concerning marriage certificate that the Panel of Judges does not only see or consider formal and material law only, but in this case the panel of judges has a strong belief that there is an indication of the occurrence of legal smuggling, as well as the reason for the determination of the judge in the case 85/Pdt.P/2017/ PA.Bn concerning marriage certificate in accordance with Article 2 of Law No. 1 Year 1974 About Marriage that marriage can be said to be valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. This means that if a marriage has fulfilled the requirements and pillars of marriage or qabul has been implemented (for Muslims), then the marriage is legal.

**Keywords:** Itsbat Marriage

## Pendahuluan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 unsur dalam perkawinan yaitu (1) ikatan lahir batin, (2) antara seorang pria dengan seorang wanita, (3) sebagai suami isteri, (4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, (5) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan atau pernikahan adalah aqad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah, Swt. Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulil amri, yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan seterusnya.

Nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan. Dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah, putusan atau penetapan hakim harus memberikan rasa keadilan yang memuaskan kepada para pencari keadilan. Selain itu juga hakim harus mempertimbangkan aturan hukum dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan itsbat nikah.

### Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang Itsbat Nikah ?
2. Bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang Itsbat Nikah ?
3. Bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang Itsbat Nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah.
2. Untuk mengetahui alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah.
3. Untuk mengetahui bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis yuridis normatif atau library research, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan kasus dan Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang itsbat nikah. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

### Pembahasan

### Alasan Hakim Menolak Perkara

#### 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Itsbat Nikah

Dalam perkara Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn yang terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu perkara ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam mengajukan permohonan isbat nikah. Majelis Hakim yang menangani perkara di atas memberikan putusan bahwasannya menetapkan untuk menolak perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon untuk permohonan isbat nikah. Adapun alasan Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah dalam permohonan ini ialah setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut ternyata ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon II masih berstatus isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Heri Apriyanto bin M Yusuf, oleh sebab itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2012 bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dari alasan tersebut di atas kesannya Pemohon II melakukan poliandri, Dalam wacana hukum nasional, praktek poliandri tidak dibenarkan karena dapat dijatuhi dengan ancaman pasal 279 KUHP. Pasal 279 (1) KUHP menegaskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa:

“barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”.

Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkulu yang menolak permohonan itsbat nikah dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn sudah benar karena melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

## **Alasan Penetapan Hakim dalam Perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Itsbat Nikah**

Menurut Hakim yang menolak perkara ini bahwa:

Hakim menolak permohonan isbat nikah dalam permohonan ini ialah setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut ternyata Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, tetapi mengaku sudah janda dihadapan Hakim Tunggal.

Disamping itu Hakim Tunggal mempertimbangan juga bahwa pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suami pertamanya adalah pada tanggal 16 Juni 2016, ini berarti Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Heri Apriyanto bin M Yusuf walaupun pernikahan pada waktu itu antara Pemohon II dan saudara Heri Apriyanto bin M Yusuf melakukan perkawinan sirri. Oleh sebab itu Majelis Hakim beranggapan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan ini juga Hakim Tunggal tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materilnya saja, akan tetapi dalam perkara ini Hakim Tunggal mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum dikarenakan menurut pandangan hakim seharusnya Pemohon II harus mengajukan itsbat nikah dan perceraian terlebih dahulu di Pengadilan Agama, baru kemudian Pemohon II bisa melakukan pernikahan dengan Pemohon I. lebih lanjut Menurut Majelis Hakim jika permohonan isbat nikah ini dikabulkan maka mengakibatkan seseorang dengan mudah melakukan nikah siri kemudian mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Bengkulu berkenaan dengan penetapannya selaras dengan hukum Islam, yang mana hal tersebut (penetapan) melalui proses pemeriksaan dan pembuktian isbat nikah tidak sesuai dengan prosedur. Bahwasannya pihak yang telah mengajukan isbat nikah telah melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan lebih jelasnya lagi bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menjadi suami istri menurut perundang-undangan yang berlaku.

## **Alasan Penetapan Hakim dalam Perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Itsbat Nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1**

## **Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam**

### **1. Menurut Syari'ah**

Itsbat nikah sangat erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana (HR. Ibnu Majah). Selanjutnya Beliau bersabda lagi yang artinya "adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" (HR. Bukhari).

Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.

Kemunculan perkara itsbat nikah merupakan alternatif jalan keluar dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pada mulanya hukum Islam seperti dikemukakan di atas tidak mengatur secara konkret adanya pencatatan perkawinan ini, berbeda dengan masalah muamalat/transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seperti dikemukakan dalam situasi tertentu yaitu ketika muamalat tidak dapat dilakukan secara tunai diperintahkan untuk mencatatnya, dikemukakan dalam Al- Quran al- Karim yang memerintahkan untuk mencatat suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai oleh pencatat yang adil, dan transaksi itu harus pula disaksikan oleh dua laki-laki yang adil sebagai saksi.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa itsbat nikah itu sangat diperlukan sebagai jalan keluar dari permasalahan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah karena sebab-sebab tertentu, untuk mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

## 2. Menurut Fikih

Ketidaktercatatan perkawinan itu perspektif fikih, terkait dengan kebiasaan umat Islam pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in yang turut mempengaruhi masa-masa berikutnya sampai saat ini. Pendapat seperti itu dapat dibaca dalam tulisan Amiur Nuruddin yang mengemukakan penyebab itu sebagai berikut:

Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimat al-'ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang artinya "Kemudharatan harus dihilangkan". Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahpahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar (Guru Besar) Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang al-zawaj al-urfy adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua katagori, yaitu peraturan syara" dan peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.

Peraturan syara" adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara" serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh

berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara".

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahah mursalah.

### 1. Qiyas

a. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mu'dayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

b. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

c. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an Nisa' ayat 21 yang artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

### 2. Maslahah Mursalah.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

## 3. Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

### 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat secara spesifik masalah itsbat nikah, tetapi dapat dipahami bahwa itsbat nikah erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan, karena salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya itsbat nikah adalah karena adanya perkawinan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai Pencatatan perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti dikemukakan di atas dalam Pasal 2 ayat (2), ditegaskan pula dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-undang Perkawinan itu yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, dipahami dan dilakukan melalui itsbat nikah, dan untuk mendapatkan pengesahan itu harus berdasarkan produk Pengadilan berdasarkan permohonan/ gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu prasarana hukum yang merupakan jalan pintas yang efektif yang memenuhi persyaratan legalistis formal meskipun tidak maksimal, dengan arti tidak setingkat dengan undang-undang, namun dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam memuat pula ketentuan yang berhubungan dengan perkara itsbat nikah yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta nikah, sebagai dijelaskan oleh Ayat (1);
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, seperti dikemukakan dalam Ayat (2);
3. Ayat (3) menjelaskan, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Ayat (4) menentukan bahwa orang-orang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali

nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan sirri bila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena itu maka berakibat hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Karena perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan di bawah tangan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut, memiliki bukti autentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Manfaat dari pencatatan perkawinan ini adalah :

Pertama : Manfaat yang bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat perkawinan. Atau menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.

Kedua : Manfaat akta nikah yang bersifat refresif yaitu bagi suami istri yang karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan) kepada pengadilan agama, pencatatan inilah disebut sebagai tindakan refresif, yang dimaksudkan untuk membentuk masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak

mementingkan aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek aspek keperdatannya juga perlu diperlukan secara seimbang.

Dalam pembahasan di atas tampaklah alasan penetapan hakim dalam Perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana esensi dari itsbat nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti autentik, telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akta nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat dimintakan itsbat nikah (pengesahan nikah).

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah. Namun menurut ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan memunculkan kemaslahatan bagi umum artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, menikah dibawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Bagi perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan) nikah kepada Pengadilan Agama hal tersebut terdapat pada pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut, memiliki bukti autentik perbuatan hukum

yang telah mereka lakukan. Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di Negara Republik Indonesia. Dan usaha ini dimaksudkan agar setiap pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif perkawinan. Tetapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban administratif saja, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Dalam pembahasan di atas tampaklah alasan penetapan hakim dalam Perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana esensi dari itsbat nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti autentik, telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akta nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat dimintakan itsbat nikah (pengesahan nikah).

## Kesimpulan

1. Alasan Hakim Menolak permohonan Pemohon dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan Pemohon II masih berstatus isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Heri Apriyanto bin M Yusuf, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak sah sehingga hakim menolak karena bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
2. Alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materilnya saja, akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum dikarenakan menurut alasan hakim seharusnya Pemohon II harus mengajukan itsbat nikah dan perceraian terlebih dahulu di Pengadilan Agama, baru kemudian Pemohon II bisa melakukan pernikahan dengan Pemohon I. Dalam pertimbangan hukumnya hakim hanya mengu-

- nakan metode literlike atau hakim sebagai corong yang menyuarakan Undang-undang dan tidak mau mengali hukum yang ada. Hakim hanya beranggapan segala sesuatu tentang hukum sudah termuat dalam undang-undang sehingga cukup menerapkannya secara sillogisme dan berasumsi akan diperoleh putusan atau penetapan yang benar atas suatu kasus yang dihadapi.
3. Alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama tetapi sahnya perkawinan perlu disahkan lagi oleh Negara (tercatat di KUA).
- Daftar Pustaka**
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali Zainudin, Hukum perdata islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Daruddin Mohammad, Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jakarta: Kalam Mulia,, 1997.
- Gani Abdul, “ Perkawinan di Bawah Tangan”. Mimbarnya Hukum No 23 Tahun VI, 1995.
- Jasmani Mujazin, Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini, <http://www.pa-rembang.go.id>. Diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 09.00 WIB.
- M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rifai Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sembiring Rosnidar, Hukum Keluarga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi Yudian, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.